BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis memiliki kesimpulan diantaranya:

1. Terhadap hal yang melatar belakangi anak sebagai pelaku Tindak Pidana Terorisme atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebagai berikut:
 - a) pengaruh dari lingkungan atau tempat bermain Anak dari orang-orang dewasa yang berada di sekitar Anak, dan kurangnya pengawasan yang diberikan kepada Anak oleh Orang Tua,
 - b) Kurangnya pemahaman tentang Nilai Toleransi, Deradikalisme dan Pancasila yang diberikan oleh keluarga atau Lembaga Pendidikan di tempat anak tersebut mengemban Pendidikan.
 - c) Karena adanya faktor financial atau ekonomi dari keluarga si anak, sehingga anak mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan diberikan janji-janji oleh pemberi perintah atau bujuk rayu yang mempengaruhi pikiran anak.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme :
 - a) Anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme adalah memang sebagai pelaku tindak pidana namun walaupun anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam pelaksanaannya anak tersebut adalah sebagai korban, dikarenakan seorang anak tersebut belum dewasa secara hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penggunaan pendekatan *restorative justice* atau diversifikasi lebih diutamakan yaitu dengan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan atau melakukan mediasi dengan keluarga pelaku dengan keluarga korban dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait untuk itu,

akan tetapi apabila anak tersebut tetap divonis oleh Majelis Hakim untuk ditahan, maka vonis hukumannya tidak boleh dari ½ ancaman pidana pokok atas tindak pidana tersebut. Dalam penahanan dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hak-hak anak harus sangat diperhatikan baik dalam proses maupun sedang menjalani masa pidana dan dengan memberikan pemahaman-pemahaman deradikalisasi, pemahaman berbangsa dan bernegara, dan pendidikan yang dapat menunjang untuk perubahan atas karakter dan psikis anak tersebut serta pola pikir anak tersebut, sehingga dapat berguna bagi masa depan anak tersebut dan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan pola pikir dan karakter yang jauh lebih baik dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

- b) Dalam kasus yang diangkat oleh Penulis adalah Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, terlibat dalam perakitian Bom yang diledakan pada Gereja, sehingga sebagai pertanggung jawaban hukum, anak harus tetap diberikan hukuman atas segala perbuatannya dengan memperhatikan keterlibatan anak dan ringan atau tidaknya tindak pidana tersebut, dikarenakan dalam hal ini anak selain menjadi Pelaku tindak pidana anak juga menjadi korban atas dasar anak dijadikan sebagai alat tindak pidana oleh orang dewasa yang berada di sekitar Anak, sehingga dalam memberikan Putusan Hukum kepada Anak, Majelis Hakim berdasarkan keyakinannya harus memperhatikan hak-hak anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk menjamin perubahan anak kearah yang lebih baik untuk masa depan Anak dan siap untuk Kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

5.2 Saran

1. Agar tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir atau dapat melakukan pencegahan, orang tua memberikan

pengawasan dan didikan yang menjunjung nilai-nilai toleransi, serta memberikan pemahaman-pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

2. Perlindungan terhadap anak dari keterlibatan tindak pidana terorisme adalah dengan cara dimulai dari pengawasan yang dilakukan orang tua, namun apabila anak tersebut sudah terlibat dalam tindakan jaringan terorisme, anak harus tetap diperhatikan sebagai korban bukan sebagai pelaku, dan tetap memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan pendidikan sehingga ketika anak tersebut kembali ke dalam lingkungan masyarakat dapat diterima dan berubah menjadi pribadi dengan yang lebih baik, pembinaan ini diberikan oleh Negara dalam pemahaman Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga menjunjung tinggi nilai toleransi sebagai warga Negara yang hidup dalam keberagaman.
3. Agar aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), tetap memperhatikan hak-hak yang menjadi kebutuhan anak guna memperbaiki dan merubah karakter dan psikis anak dengan memberikan pemahaman dan pendidikan deradikalisasi, sehingga anak tersebut setelah menjalani hukumannya dapat kembali dengan baik ke dalam masyarakat sebagaimana yang harus diperoleh anak sebagaimana mestinya dalam memberikan hukuman, yaitu dengan memperhatikan Pendidikan anak, lingkungan anak, memberikan kegiatan yang positif dalam tumbuh kembang anak, selama menjalani masa hukuman di dalam LPKA.